

- WORKERS
- EMPLOYEES

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA



AN 13/03

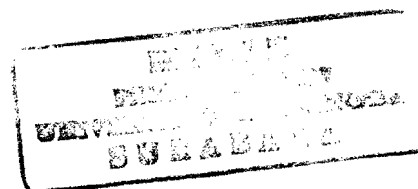
Tjo

P

BASTIANI TJOKRONEGORO
NIM : 030115347

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA**

SKRIPSI

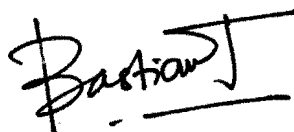
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramli, SH., M.Hum.
NIP. 131878388

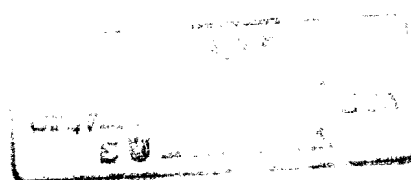
Penyusun,



Bastiani Tjokronegoro
Nim : 030115347

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

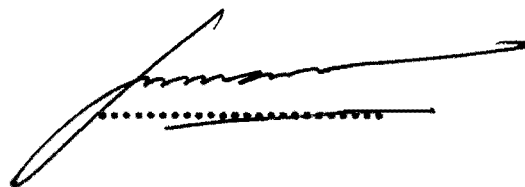
2004



**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal, 23 Desember 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Machsoen Ali, SH,MS.



.....

Anggota : 1. Lanny Ramli, SH,ML.Hum.



.....

2. Dr. ML. Souhoka, S.H.,M.S.



.....

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Mogok kerja sebagai hak kaum buruh guna melaksanakan dan memperjuangkan kepentingannya, dilakukan secara bertanggung jawab, setelah berbagai upaya penyelesaian permasalahan perburuhan dengan mekanisme perundingan melalui musyawarah untuk mufakat gagal dilaksanakan. Rencana mogok harus diberitahukan kepada pengusaha dan instansi yang berwenang minimal tujuh hari sebelumnya, dan harus memenuhi sejumlah prosedur dan peraturan yang ada mengenai dilaksanakannya mogok kerja.

Mogok kerja yang dilakukan secara sah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan mogok kerja yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada disebut juga dengan Mogok Kerja Tidak Sah, yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Nomor : KEP.232/MEN/2003.

2. Bagi para pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah mendapat perlindungan hukum, atas segala tindakan hukum yang dilakukan pihak lain, misalnya seperti menghalang-halangi, menahan, mengganti para pekerja yang melakukan mogok kerja, dan lain lain, yang diatur di Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

Pekerja berhak mendapatkan upah selama melakukan pemogokan secara sah untuk menuntut pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan yang bersifat normatif, yaitu kewajiban pengusaha yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Sedangkan mogok kerja tidak sah tidak dilindungi oleh Undang-undang, karena mogok kerja tidak sah tersebut dilaksanakan diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, apabila ada pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah, dia harus menanggung sendiri segala risikonya, karena ketentuan yang ada dalam Undang-undang tidak mengatur mengenai perlindungan hukum mogok kerja tidak sah.

2. Saran

1. Hendaknya apabila ada perselisihan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja, dilakukan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu, sebelum para pekerja memutuskan akan melakukan mogok kerja. Sehingga persoalan yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan masing-masing pihak dapat mengetahui apa yang diharapkan dari pihak yang lain, dan tujuan bersama dari pihak pekerja dan pihak pengusaha dapat tercapai tanpa harus membuat masalah yang ada semakin berlarut-larut.
2. Sebelum melakukan mogok kerja, hendaknya para pekerja tahu mengenai ketentuan dan peraturan melakukan mogok kerja secara sah, sehingga para pekerja dapat melakukan mogok kerja secara sah yang diatur dalam

Undang-undang, dan pekerja tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum ketika para pekerja tersebut melakukan mogok kerja.